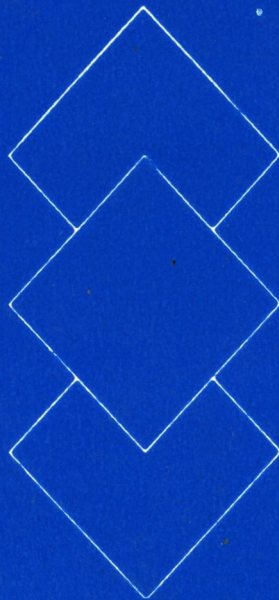


# CAKRAWALA PENDIDIKAN

FORUM KOMUNIKASI ILMIAH  
DAN EKSPRESI KREATIF ILMU PENDIDIKAN



**CAKRAWALA PENDIDIKAN**  
**Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan**

Terbit dua kali setahun pada bulan April dan Oktober  
Terbit pertama kali April 1999

**Ketua Penyunting**  
Kadeni

**Wakil Ketua Penyunting**  
Syaiful Rifa'i

**Penyunting Pelaksana**  
R. Hendro Prasetyanto  
Udin Erawanto  
Riki Suliana  
Prawoto

**Penyunting Ahli**  
Miranu Triantoro  
Masruri  
Karyati  
Nurhadi

**Pelaksana Tata Usaha**  
Yunus  
Nandir  
Sunardi

**Alamat Penerbit/Redaksi:** STKIP PGRI Blitar, Jalan Kalimantan No. 49 Blitar, Telepon (0342)801493. Langganan 2 nomor setahun Rp 10.000,00 ditambah ongkos kirim Rp 3.000,00. Uang langganan dapat dikirim dengan wesel ke alamat Tata Usaha.

---

**CAKRAWALA PENDIDIKAN** diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Blitar. **Ketua:** Dra. Hj. Karyati, M.Si, **Pembantu Ketua:** M. Khafid Irsyadi, ST..S.Pd

---

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media cetak lain. Syarat-syarat, format, dan aturan tata tulis artikel dapat diperiksa pada *Petunjuk bagi Penulis* di sampul belakang-dalam jurnal ini. Naskah yang masuk ditelaah oleh Penyunting dan Mitra Bestari untuk dinilai kelayakannya. Penyunting melakukan penyuntingan atau perubahan pada tulisan yang dimuat tanpa mengubah maksud isinya.

# CAKRAWALA PENDIDIKAN

Forum Komunikasi Ilmiah dan Ekspresi Kreatif Ilmu Pendidikan

Volume 13, Nomor 1, April 2011

## Daftar Isi

Pembangunan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Kewarganegaraan .....	1
<i>Abd. Jabar Abdul</i>	
Kepemimpinan dan Organisasi .....	15
<i>Kadeni</i>	
Model-model Pembelajaran yang Inovatif dan Menyenangkan .....	29
<i>Lulus Priyoananto</i>	
Pendidikan Kewarganegaraan ( <i>Civic Education</i> ) dan Misi Membentuk Kepribadian Bangsa .....	44
<i>M. Syahri</i>	
Menciptakan Suasana Belajar Berdasarkan Prinsip-prinsip Belajar Andragogi: Sebuah Renungan Refleksi Pendidikan Non Formal .....	58
<i>Miranu Triantoro</i>	
Pengembangan Budaya Organisasi Sekolah, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pengaruhnya terhadap Kinerja Guru di Sekolah .....	65
<i>Ninik Srijani</i>	
Appositive Clauses in English Syntax .....	83
<i>R. Hendro Prasetianto</i>	
TEaching Speaking Based on Procedure Text Using Counseling-learning Approach for Beginners .....	94
<i>Saiful Rifai</i>	
The Significance of Pragmatic Awareness in the Teaching of Exchanges .....	99
<i>Saptaria Laksanawati</i>	
Pengaruh Pemberian Tugas Resume dan Motivasi Belajar terhadap Prestasi Belajar .....	111
<i>Sunarno</i>	
Pemanfaatan Teknologi Multimedia dalam Pembelajaran Matematika .....	127
<i>Tatiek Ismiasri</i>	
Pengaruh Penerapan Pembelajaran Kooperatif ( <i>Jigsaw</i> dan <i>STAD</i> ) dan Pengetahuan Awal terhadap Prestasi Belajar Matakuliah Belajar dan Pembelajaran .....	142
<i>Agus Budi Santosa</i>	

# PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGRAAN

**Abd. Jabar Abdul**

**Abstrak:** Reputasi suatu bangsa sangat tergantung pada seberapa jauh bangsa itu mampu membangun warga negara memiliki karakter yang sesuai dengan ideologi bangsa, budaya bangsa dan nilai-nilai keagamaan masyarakat. Bangsa yang berkarakter baik dan kuat mencerminkan mulianya derajat dan martabat suatu bangsa. Bangsa yang bermartabat adalah bangsa yang memiliki kemandirian dan daya saing dalam dinamika percaturan dunia yang kompleks dan global. Cita ideal negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa harus dibarengi dengan kemauan kuat dan komitmen pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk memanifestasikan konsep, gagasan dan nilai-nilai kebaikan universal secara jujur dan konsisten dalam tindak nyata pada berbagai segmen kehidupan, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral setiap warga negara dan pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan perjuangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kompleksitas persoalan yang dihadapi bangsa dewasa ini, disinyalir oleh banyak kalangan, terutama adalah karena bersentuhan dengan permasalahan karakter. Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa “kelahiran dan menjalankan ritual fisik tidak dapat menentukan derajat baik atau buruk seseorang. Kualitas karakterlah satu-satunya faktor penentu derajat seseorang”. Ketika negara-negara lain di Asia seperti Thailand, Malaysia, Korea Selatan bangkit dengan segera, setelah mengalami krisis moneter yang melanda Asia pada tahun 1997, Indonesia sampai kini masih kelihatan suram untuk bangkit dari krisis dan keterpurukan.

---

*Abd. Jabar Abdul adalah dosen Fakultas Syari'ah IAIN Ambon, dan Mahasiswa Program S3 Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia Bandung angkatan Thn 2009/2010.*

Krisis multidimensi tersebut sebetulnya mengakar pada menurunnya kualitas moral bangsa yang dicirikan oleh membudayanya praktek KKN dan konflik antar (etnis, agama, politisi, remaja, siswa, antar RW dsb), meningkatnya kriminalitas, menurunnya etos kerja. Budaya korupsi yang merupakan praktik pelanggaran moral (ketidakjujuran, tidak bertanggung jawab, rendahnya disiplin, rendahnya komitmen kepada nilai-nilai kebaikan), adalah penyebab utama Indonesia sulit untuk bangkit dari krisis (Megawangi, 2004).

Membangun karakter (*character building*) tentu harus menjadi pilihan bagi semua orang, terutama bagi para pemimpin bangsa ini. Presiden Susilo Bambang Yudoyono ketika membuka Temu Nasional (Indonesia Summit) thn 2009 di Jakarta, menyampaikan stateman resmi dan meminta Mendiknas Muhammad Nuh, untuk mengubah metodologi pembelajaran yang berpusat kepada siswa, agar mampu mendorong siswa menjadi kreatif dan inovatif, memunculkan semangat kemandirian dan jiwa kewirausahaan anak didik. Serta menyelenggarakan pendidikan berbasis karakter (Kompas, 30 Oktober 2009).

Maxwell sebagaimana dikutip Aswandi (2010) menegaskan bawa karakter yang baik lebih dari sekedar dikatakan, melainkan sebuah pilihan yang membawa kesuksesan. Ia bukan anugerah, melainkan dibangun sedikit demi sedikit, dengan pikiran, perkataan, perbuatan, kebiasaan, keberanian, dan bahkan dibentuk dari kesulitan hidup.

Zig Ziglar dalam (Aswandi, 2010) mengigatkan, bahwa perhatikanlah pikiranmu karena ia akan menjadi kata-katamu. Perhatikanlah kata-katamu karena ia akan menjadi perilakumu. Perhatikanlah perilakumu karena ia akan menjadi kebiasaanmu. Perhatikanlah kebiasaan-kebiasaanmu, karena ia akan menjadi karaktermu, dan perhatikan karaktermu karena ia akan menjadi takdirmu. Jadi kata kunci "karakter" terbentuk dari adanya konsisten pada perkataan, prilaku, kebiasaan dan tindakan. Sekecil apapun ia akan membawa perubahan besar pada aspek kehidupan lainnya.

Tulis Kevin Ryan dan Thomas Likona dalam Megawangi (2004) bahwa "Semua masyarakat, tentu saja, harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekedar untuk bertahan. Mereka juga harus tumbuh dalam memahami apa artinya menjadi sebuah komunitas manusia, dalam memberikan kesempatan kepada setiap anggotanya untuk tumbuh secara utuh, dan dalam kapasitasnya untuk menangani problema etika yang timbul dari perubahan teknologi dan sosial lainnya. Lagi pula, mereka harus belajar untuk berfungsi sebagai bagian dari komunitas dunia yang kompleks, di mana untuk terwujudnya perdamaian dunia dan keadilan membutuhkan suatu hubungan kerjasama yang kuat. Tetapi apapun tugasnya; untuk bertahan atau tumbuh-kembang, setiap masyarakat, mau tidak mau bergantung kepada keberhasilannya dalam membentuk kualitas karakter masyarakatnya.

Faktor mendasar yang berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter bangsa diantaranya adalah arah pembangunan dunia pendidikan. Pembangunan yang beratata nilai merupakan esensi dari suatu pemahaman pembangunan yang sepenuhnya berorientasi pada manusia sebagai subyek pembangunan atau lazim dikenal dengan *human oriented development*. Tanpa adanya orientasi demikian, maka pembangunan hanya akan mencakup tataran fisik dan tanpa disertai adanya pembangunan budaya serta peningkatan standar nilai kehidupan manusianya. Hal yang mendominasi terhadap *performance* manusia sebagai subyek pembangunan yang beratata nilai tersebut tiada lain adalah pendidikan (Sofyan Sauri 2010).

Dalam konteks pendidikan, lebih husus pendidikan kewarganegaraan, pemerintah telah merumuskan tujuannya secara umum baik untuk pendidikan dasar maupun menengah, melalui pembekalan kompetensi dasar peserta didik dalam hal: (1) berpikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menangani isu kewarganegaraan; (2) berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta bertindak secara sadar dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) pembentukan diri yang didasarkan pada karakter-karakter positif masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia yang demokratis (Kurikulum Kewarganegaraan Untuk SD,SLTP,SMU, 2001:12).

Ditegaskan Winataputra (2006) bahwa tugas pendidikan kewarganegaraan dengan paradigma barunya diarahkan pada pengembangan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni: (1) mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*); (2) membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*); dan (3) mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk a *good citizenship*, bukan hanya dalam dimensi rasional yang selama ini terjebak dalam budaya belajar verbalistik, tapi juga meliputi dimensi spritual, emosional, dan sosial, sehingga paradigma baru yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan akan bercirikan multidimensional.

Upaya pengembangan karakter melalui pendidikan sebenarnya telah banyak dilakukan, terutama di dunia persekolahan melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*). Namun demikian menurut Sapriya (2007) upaya pendidikan kewarganegaraan belumlah optimal dan mencapai harapan.

Usaha membentuk karakter yang baik menurut Megawangi (2004) bukan pekerjaan mudah, memerlukan pendekatan komprehensif yang dilakukan secara eksplisit, sistematis, dan berkesinambungan yang dimulai dari sejak kecil di lingkungan keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, selain di lingkungan persekolahan pengembangan karakter bangsa di lingkungan masyarakat (*com-*

*munity civic*) sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam rangka menciptakan warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizenship*).

#### PEMBANGUNAN KARAKTER DALAM MEMULIHKAN CITRA BANGSA

Bung Karno sebagai negarawan, pendiri dan proklamator kemerdekaan RI, pernah menekankan betapa pentingnya pembangunan karakter bangsa, *nation and character building*, agar bangsa ini memiliki harga diri, sebagai bangsa yang berdaulat, sehingga tidak dipandang rendah oleh bangsa lain dalam percaturan politik dunia.

Pernyataan tersebut mengandung makna agar kita segera kembali menegakan semangat kebangsaan, politik kebangsaan dan jati diri bangsa, agar bangsa Indonesia dapat sepenuhnya berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan, agar kita menjadi bangsa yang kuat. Kita harus memulai upaya untuk bangkit kembali dari keterpurukan dengan membangun karakter bangsa.

Ditegaskan Damardjati Supadjar dalam Soegeng (2009) bahwa bangsa ini telah kehilangan stamina dan jati diri sebagai bangsa Timur yang memiliki falsafah hidup yang adiluhung, yaitu Pancasila. Akibatnya kondisi negeri ini semakin carut-marut. Selama sikap mental bangsa ini tidak segera dirubah, rasanya tidak mungkin keterpurukan dapat segera diatasi.

Kenyataan ironis dalam pergaulan antar bangsa, betapa kita telah kehilangan kepercayaan dan begitu mudah diremehkan oleh bangsa lain. Nurchalish Madjid salah satu yang pernah menyaksikan perlakuan itu. Setelah menyelesaikan studi doktor di Amerika, ia menyempatkan diri ke Timur Tengah, guna melaksanakan Umrah, beliau ditemani bule berkebangsaan Amerika. Di tengah perjalanan si bule memaksa supir taxi berhenti dan turun. Sesampai di tempat tujuan, Cak Nur bertemu kembali dengan si bule tadi, seraya bertanya, "kenapa tadi anda memaksa untuk diturunkan di tengah perjalanan?. Si bule menjawab "karena saya ketahui setelah berada dalam taxi itu, supirnya adalah orang Indonesia. Lalu kenapa? Ada persoalan apa anda dengan orang Indonesia?. Si bule menjawab, bukankah orang Indonesia karakternya lemah dan suka menipu.

Goncangan mengenai krisis jati diri dan lemahnya karakter yang menggerusi citra bangsa ini, juga sempat dialami H.A.R. Tilaar yang biasanya dalam menghadapi upacara-upacara Internasional dengan bangga mengenakan pakaian batik sebagai salah satu lambang identitas bangsa Indonesia. Tapi ketika menghadiri upacara wisuda anak bungsunya di Harvard University thn 2005, beliau dan keluarga enggan mengenakan baju batik, seakan-akan mereka segan menunjukkan

jati diri sebagai bangsa Indonesia. Tentunya hal ini mempunyai alasan, setidaknya karena mentalitas kekerasan, pembunuhan, kemiskinan dan korupsi, dan terutama peristiwa 11 September 2005 telah membuat jati diri bangsa Indonesia terusik.

Menurut Tilaar (2007) Ternyata identitas atau jati diri suatu bangsa menuntut kerja keras dan waktu yang lama untuk membinanya. Jati diri atau identitas bangsa Indonesia dewasa ini mengalami guncangan. Citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang ramah-tamah dan cinta damai di mata dunia Internasional seakan-akan berubah menjadi bangsa yang beringas dan kehilangan rasa persatuan sebagai bangsa Indonesia. Sungguhpun jati diri bangsa Indonesia telah cukup lama merupakan jargon politik namun ternyata hanya sekedar merupakan *lip service* yang tidak berarti. Meskipun demikian beliau yakin bahwa identitas bangsa Indonesia yang positif dapat dikembangkan melalui proses pendidikan baik informal, formal, dan non-formal.

Yahya M. Abdul Aziz dalam (Wihardit 2006) pada tulisan kata pengantarnya yang berjudul Menyongsong Fajar Milinium Baru di Ufuk Timur, pada sebuah buku yang berjudul Visi Global. Dalam tulisan itu beliau melihat adanya perubahan dalam tatanan sosial saat ini yang disebabkan oleh adanya perubahan sistem informatika. Ia mengutip pernyataan Emile Durkheim yang menyatakan ada satu kondisi yang disebut *normlessness* yaitu suatu keadaan hampa norma di mana masyarakat kehilangan kepercayaan dan meninggalkan kepatuhan terhadap norma-norma.

Pandangan serupa disampaikan Nurchalis Madjid, bahwa perubahan di Indonesia terjadi secara mendadak dan ini dirasakan lebih berat, berbeda dengan kondisi perubahan di Barat, di sana tidak dirasakan terlalu berat karena telah dilakukan secara bertahap. Perubahan ini disebabkan oleh berbenturan tiga gelombang (istilah Toffler) yaitu pola hidup sosial agraris, pola hidup sosial industrial, dan pola hidup sosial zaman informatika

Perubahan yang cepat tersebut menimbulkan krisis dalam masyarakat, karena perubahan tersebut terjadi secara mendadak. Krisis tersebut menurut Nurcholis Madjid muncul dalam bentuk;

1. Deprivasi relatif yaitu perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal oleh orang lain dan kalangan tertentu dalam masyarakat akibat tidak dapat mengikuti perubahan dan kesulitan menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
2. Dislokasi yaitu perasaan tidak mempunyai tempat dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Ini dapat dilihat dalam masyarakat marginal di pinggiran kota.
3. Disorientasi yaitu suatu perasaan tidak mempunyai pegangan hidup akibat



yang ada selama ini tidak dapat lagi dipertahankan karena terasa tidak cocok dan kehilangan identitas.

4. Negativisme yaitu perasaan yang mendorong ke arah pandangan yang serba negatif terhadap susunan yang mapan, dengan sikap-sikap tidak percaya, curiga, bermusuhan, melawan dan sebagainya.

Erich Fromm bahkan lebih ekstrim lagi, ia memperkirakan bahwa pada tahun 2000-an bukan merupakan periode dimana perjuangan manusia demi kebebasan dan kebahagiaan dalam meraih puncak pemenuhan dan kebahagiaan, tetapi merupakan masa dimana manusia berhenti menjadi manusia, beralih menjadi mesin yang tidak berpikir dan tidak berperasaan.

Thomas Lickona dalam (Megawangi, 2004) menegaskan terdapat sepuluh karakteristik jaman yang harus diwaspadai karena jika karakteristik tersebut ada, maka itu berarti suatu bangsa sedang menuju jurang kehancuran. Kesepuluh karakter tersebut adalah (1) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, (2) penggunaan bahasa dan kata-kata yang memburuk, (3) pengaruh *peer group* yang kuat dalam tindakan kekerasan, (4) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan seks bebas, (5) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk, (6) semakin menurunnya etos kerja, (7) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, (8) semakin rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara, (9) membudayanya ketidakjujuran, dan (10) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama.

Barangkali tidak berlebihan bila dikatakan pandangan para ahli tersebut telah bersentuhan langsung dengan kondisi kita bangsa Indonesia saat ini. Kita merasakan betapa masyarakat bukan saja dilanda oleh krisis ekonomi, tetapi yang paling memprihatinkan adalah “krisis moral dan budaya” yang sangat parah. Kita sudah jarang melihat keramah-tamahan, tolong menolong, teposeliro dalam suasana kehidupan bangsa yang multikultural dan dikenal sebagai ciri dari karakter bangsa Indonesia selama ini. Kita seakan telah menjadi bangsa yang dengan gampang saling bermusuhan, saling curiga dan sebagainya. Media Indonesia Pernah memuat sebuah tulisan yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat ini sedang mengalami penghancuran, dan penghancurnya adalah bangsa Indonesia sendiri. Menurut Hamungku Buwono X (2007) tantangan bangsa ini setidaknya mencakup 4 hal: (1) menguatnya budaya konsumerisme dan kekerasan; (2) menipisnya kesadaran pluralisme dan semangat kebangsaan; (3) tingginya kemiskinan dan pengangguran; (4) ketertinggalan dalam membaca dinamika geopolitik yang terjadi di Pasifik Rim.

Tentunya banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut di atas. Di antaranya kita seolah telah menjadi bangsa yang tidak siap menerima perubahan-

an, mungkin karena bekal pengetahuan dan pemahaman yang tidak memadai mengenai cara hidup dalam suatu perubahan, atau boleh jadi bangsa kita telah mengalami disorientasi dan pemudaran nilai-nilai moral Pancasila sebagai karakter dan jati diri ke Indonesiaan kita. Kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut tanpa ada perbaikan, suatu saat kita akan sampai pada satu titik yang namanya kehancuran, dan penyebabnya adalah kita sendiri. Oleh karena itu diperlukan solusi dan ikhtiar maksimal, agar bangsa ini segera menyadari kekhilafannya, untuk belajar, keluar dan bangkit dari krisis, sebagaimana dinyatakan oleh Thomas Kuhn bahwa timbulnya krisis menjadi prasyarat untuk munculnya revolusi ilmiah yang dalam waktu yang sama akan melahirkan paradigma baru dan menghilangkan paradigma lama, sehingga bangsa Indonesia bangkit untuk menemukan kembali jati dirinya yang hilang selama ini.

Banyak jalan yang bisa ditempuh untuk memulihkan kembali citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang besar, berdaulat dan bermartabat. Menurut Sultan Hamungku Buwono X (2007) untuk mengatasi masalah tersebut, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali merajut kembali ke-Indonesiaan kita, merajut kembali kebudayaan, ekonomi, politik, hukum dan pertahanan keamanan yang kita miliki.

KH. Abdullah Gymnastiar dalam (Megwangi, 2004) menegaskan bahwa sebagai anak bangsa kita semua tentu berpikir dan bertanya, kenapa bangsa sebesar ini, hanya dalam sekejap, menjadi bangsa yang kerdil, yang terkenal hanya karena kekerasannya?. Kenapa bangsa sebesar ini demikian terpuruk dan kehilangan harga diri?. Beliau dengan tegas menyerukan kepada anak-anak bangsa ini, kita semua bukan bangsa yang bodoh. Bangsa ini tidak akan tegak dengan hati yang membara penuh permusuhan, kedendaman, dan kebencian ... tentu dengan tekad sepenuh hati disertai dengan keikhlasan, bersama-sama membangun bangsa ini dengan hati yang bening, dengan hati yang tulus dan dengan hati yang penuh kemuliaan, inilah saatnya kita bangkit bersama-sama membangun bangsa dengan nurani yang penuh ketulusan dan kasih sayang.

Tidak dapat disangkal bahwa citra peradaban umat manusia hanya bisa diraih di atas fondasi bangunan nilai-nilai spritualitas keagamaan dan kemanusiaan universal. Adalah Nabi Muhammad saw, sebagai penutup deretan panjang pembawa ajaran Tuhan, telah mewariskan sebuah model masyarakat idaman yang diakui keunggulannya oleh para pakar sosiolog dan politik modern seperti Robert N. Bella. Ajaran Universal kemanusiaan yang dijiwai oleh ajaran suci agama yang menjadi fondasi bangunan masyarakat Madani bentukan Nabi itu, dapat dimaknani bahwa faktor akhlak (karakter) manusia yang menjadi esensi terbentuknya masyarakat yang berkeadaban.

Menurut Cak Nur dalam (Megawangian 2004) masyarakat Madani yang menjadi contoh unggulan sebuah sistem kemasyarakatan *civilized*, tidak terlepas

dari keberhasilan Nabi dalam membentuk moral masyarakat pengikutnya sejak periode Makkah, melalui penanaman nilai-nilai kecintaan kepada Allah, kepada sesama manusia dan lingkungan alam, pembersihan hati, dan kepatuhan kepada hukum dan aturan-aturan kemasyarakatan yang dicontohkannya. Sehingga ketika sistem hukum kenegaraan dan kemasyarakatan ditetapkan bisa berjalan dengan baik karena pengikutnya (masyarakat) yang berakhlak mulia telah memperkuat sistem itu sendiri.

Vaclav Havel seperti dikutip Nuchalish Madjid, bahwa masyarakat Madani adalah masyarakat yang dijiwai oleh cita rasa baik, kejujuran dan tanggung jawab. Cita rasa baik, kejujuran dan tanggung jawab hanya bisa diinternalisasikan bukan pada kolektivitas, tetapi pada individual. Analisis Max Weber tentang kemajuan bangsa Eropa dihubungkan karena etika Protestan (*Calvinisme*) yang telah mewarnai perilaku kehidupan sehari-hari bangsa Eropa menjadi masyarakat industri maju sejak abad ke 18, karena kerja keras, kejujuran, keseriusan, menghargai waktu dan perilaku hemat.

Dengan demikian untuk mengembalikan citra bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berkeadaban, maka diperlukan revitalisasi dan reorientasi pengokohan jati diri dan karakter bangsa, baik sebagai individu maupun kolektif dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, dengan merajut kembali nilai-nilai moral dan budaya di atas fondasi kebenaran ajaran agama dan kemanusiaan universal.

## PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PEMBANGUNAN KARAKTER

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang bersifat multifaset dengan konteks lintas bidang keilmuan. Menurut Winataputra (2001) sifat multidimensional inilah yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai; pendidikan kewarganegaraan, pendidikan politik, pendidikan nilai dan moral, pendidikan karakter kebangsaan, pendidikan kemasyarakatan, pendidikan hukum dan hak asasi manusia, serta pendidikan demokrasi.

Chreshore dalam (Wahab, 2008) menjelaskan PKn memiliki obyek kajian pokok ilmu politik, khususnya konsep demokrasi politik (*political democracy*) untuk hak dan kewajiban (*duties and of rights citizens*). Dari obyek kajian pokok inilah berkembang konsep *civicus* (bahasa Latin) yang secara harfiah berarti warga negara. Secara akademis *Civics* diakui sebagai embrionya *Civic Education* dan di Indonesia diadaptasi menjadi Pendidikan Kewarganegaraan.

Secara metodologis, PKn sebagai suatu bidang keilmuan merupakan pengembangan dari tradisi *social studies* yakni transmisi kewarganegaraan. Saat ini tradisi itu telah berkembang menjadi suatu struktur keilmuan yang dikenal

sebagai *citizenship education*, yang memiliki paradigma sistemik dengan tiga domain yakni; domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural (Winataputra, 2001). Domain akademis terkait dengan berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler adalah konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan non formal. Domain sosial kultural adalah konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat.

Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Civic Education* dan *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara. Namun, secara umum tujuan negara mengembangkan PKn adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*civic intelligence*) termasuk kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spritual, memiliki rasa tanggung jawab (*civic responsibility*), memiliki kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa (*civic participation*).

Jarolimiek and Parker dalam Wahab (2008) menjelaskan, misi utama dari *socoal studies* (PKn) adalah membantu para siswa belajar tentang dunia sosial dimana mereka bertempat tinggal dan bagaimana caranya; belajar memecahkan realitas sosial, dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitudes*), dan keterampilan (*skills*) yang diperlukan untuk membentuk pencerahan kemanusiaan.

UUD NKRI 1945 sebagai landasan konstitusioan PKn pada bagian Pembukaan alinea keempat memberikan dasar pemikiran tentang tujuan negara, salah satunya adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pernyataan ini mengandung makna pentingnya pendidikan bagi seluruh anak bangsa, sekaligus memberikan pesan kepada penyelenggara negara dan segenap warga negara agar memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku secara cerdas dalam proses pemecahan permasalahan dan pengambilan keputusan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan.

Mengenai fungsi dan tujuan pendidikan nasional, secara tegas dinyatakan dalam UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas, pasal 3 bahwa: Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam hubungannya dengan pendidikan kewarganegaraan, pada pasal 37 UU Sisdiknas menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar, menengah dan

pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Pada bagian penjelasan pasal 37 dikemukakan pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Dengan mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan sesuai Permendiknas Nomor 23/2006, Abul Azis Wahab (2008: 280) mereduksi kerangka dasar kurikulum kelompok mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta meningkatkan kualitas dirinya sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kesadaran dan wawasan, termasuk wawasan kebangsaan, jiwa patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Uraian di atas memberi pemahaman bahwa dari aspek fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan lebih khusus pendidikan kewarganegaraan, berkorelasi langsung dengan pendidikan karakter, atau merupakan bagian yang tak dapat dilepaspisahkan dari upaya pembangunan karakter bangsa. Menurut Wynne dalam (Sauri, 2010), istilah karakter diambil dari bahasa Yunani "*charassian*" yang berarti *to mark* (menandai atau mengukit). Secara istilah terdapat dua pengertian, pertama, berkarakter menunjukkan bagaimana seseorang bertingkah laku. Apabila seseorang berperilaku tidak jujur, kejam atau rakus, maka orang tersebut memanifulasikan karakter jelek, sebaliknya apabila seseorang berperilaku jujur, suka menolong, maka orang tersebut memanifulasikan karakter mulia. Kedua, istilah karakter erat kaitannya dengan personality. Seseorang disebut berkarakter kalau tingkah lakunya sesuai dengan kaidah moral.

Thomas Lickona dalam (Sauri, 2010) mengemukakan bahwa karakter terdiri atas tiga bagian yang saling terkait, yaitu pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behavior*), karakter yang baik terdiri atas mengetahui kebaikan, mencintai atau menginginkan kebaikan, dan melakukan kebaikan.

Enam hal penting yang harus diajarkan berkenaan dengan moral *knowing* yaitu,; (1) moral *awareness* (kesadaran moral), (2) knowing moral *values* (mengetahui nilai-nilai moral), (3) *perspective taking*, (4) moral *reasoning*, (5) *decision making*, dan (6) *self knowledge*. Sedangkan moral *feeling* adalah aspek lain yang harus ditanamkan kepada peserta didik dan merupakan sumber energi dari diri manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral. Terdapat 6 hal yang merupakan aspek emosi yang harus mampu dirasakan oleh

seseorang untuk menjadi manusia berkarakter, yaitu; (1) *conscience* (nuraani), (2) *self esteem* (percaya diri), (3) *empathy*, (4) *loving the good* (mencintai kebenaran), (5) *self control* (mampu mengontrol diri) (6) *humanity* (kerendahatian). Adapun moral *action* adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindak nyata. Perbuatan moral ini merupakan hasil dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang dalam perbuatan yang baik, maka harus dilihat tiga aspek lain dari karakter, yaitu; (1) kompetensi (*commpetence*), (2) keinginan (*will*), (3) kebiasaan (*habit*).

Sofyan Sauri (2010) menjelaskan bahwa pendidikan karakter adalah usaha sadar untuk mendidik peserta didik dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan universal baik yang bersumber dari ajaran agama, tradisi dan budaya agar mereka kelak dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungannya.

Dari uraian di atas dapat ditarik benang merah bahwa secara konsepsional tujuan dan fungsi pendidikan nasional dan lebih husus pendidikan kewarganegaraan pada hakikatnya adalah untuk membangun karakter bangsa untuk menjadi warga negara yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, kecerdasan sosial dan keterampilan kewarganegaraan yang dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang bersumber dari Pancasila dan UUD NKRI 1945, ajaran agama dan budaya bangsa sebagai modal dasar dalam membentuk jati diri dan kepribadian sebagai warga negara yang bertanggung untuk memberikan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karena itu *citizenship education* atau *civic education* seyogyanya memiliki jatidiri (Winataputra 2007), diorganisasikan secara lintas-bidang ilmu; difasilitasi dengan pembelajaran yang bersifat partisipatif dan interaktif; isi dan prosesnya dikaitkan pada kehidupan nyata; diselenggarakan dalam situasi yang demokratis; diupayakan agar mewadahi keanekaragaman sosial budaya masyarakat; dan dikembangkan bersama secara kolaboratif oleh sekolah, orang tua dan masyarakat termasuk pemerintah. Jatidiri tersebut pada dasarnya secara konseptual mencerminkan konsep "*thick citizenship education*" yang merujuk pada kontinum "*education For citizenship*".

Mereduksi misi yang dikembangkan oleh "*Cente for Civic Education*" (CCE), maka PKn harus menjalankan misi meningkatkan upaya pengembangan partisipasi yang cerdas dan bertanggung jawab dari warganegara dengan kepedulian penuh terhadap nilai-nilai demokrasi konstitusional, yang pada gilirannya dapat memfasilitasi berkembangnya warganegara yang cerdas,

kompeten dan bertanggung jawab (Winataputra 2007). Jadi menurut model *CCE*, yang menjadi fokus utama tujuan, isi dan proses pendidikan dari “*Civic Education*” adalah proses pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan cita-cita, nilai dan prinsip demokrasi konstitusional negara melalui berbagai bentuk interaksi dalam praksis demokrasi di sekolah dan dalam masyarakat.

Winataputra menjelaskan bahwa dalam konsep pembelajaran, pada tataran aplikatif hal mendasar yang perlu dipahami terhadap insan adalah mengenai tugas, tanggung jawab, dan panggilan pertama seorang manusia adalah menjadi pembelajar, sedangkan pelajaran pertama dan terutama yang perlu dipelajarinya adalah belajar menjadikan dirinya semanusiawi mungkin. Manusia pembelajar itu dikonsepsikan sebagai; pertama, berusaha mengenali hakekat dirinya, potensi dan bakat-bakat terbaiknya, dengan selalu berusaha mencari jawaban tentang pertanyaan; “Siapakah aku?”. “Darimanakah akau datang?”. “Kemanakah aku akan pergi?”. “Apakah yang menjadi tanggung jawabku dalam hidup ini?”. Dan “Kepada apa dan siapa yang harus dipercaya dan perpegangi?”. Kedua, berusaha sekuat tenaga untuk mengaktualisasikan segenap potnsinya itu, mengekspresikan dan menyatakan dirinya sepenuhnya, seutuh-utuhnya, dengan cara menjadi dirinya sendiri dan menolak untuk dibanding-bandingkan dengan segala sesuatu yang “bukan dirinya”.

Pembelajaran membuka pintu gerbang kemungkinan untuk menjadi manusia dewasa dan mandiri, dan untuk berubah dari tidak berdaya menjadi sumber daya. Bertumbuh menjadi dewasa dan mandiri berarti semakin mengenal “diri” semakin jujur dengan diri sendiri, semakin otentik, dan menjadi semakin unik tak terbandingkan. Menjadi diri sendiri harus menjadi tujuan tertinggi dalam hidup pribadi seorang anak manusia. Ia harus menetapkan tujuan tersebut berdasarkan kemauan yang kuat. Dan belajar menjadi seseorang yang bertanggung jawab untuk hanya menjadi dirinya sendiri dan bukan yang lain, menurut Winataputra, itulah jalan menuju pemberdayaan, kemerdekaan dan kedaulatan diri, sebagaimana empat pilar pendidikan (*Unesco*) yaitu; *Learning to know* (belajar mengetahui); *Learning to do* (belajar berbuat); *Learning to live together, learning to live with others* (belajar hidup bersama); *Learning to be* (belajar menjadi diri sendiri).

## KESIMPULAN

Pendidikan kewarganegaraan mengemban misi pembangunan karakter. Karakter bangsa yang baik dan kuat merupakan fondasi bagi keberlangsungan bangsa dan negara yang berdaulat dan mandiri. Warga negara yang memiliki karakter ke-Indonesiaan adalah warga negara yang memiliki kecerdasan

intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spritual, kecerdasan sosial dan keterampilan kewargaegaraan, yang dengannya mampu mengembangkan nilai-nilai Pancasila, budaya dan agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, peka dan tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman, ikut bertanggung jawab terhadap ketahanan dan keutuhan bangsa dan negara, serta berperan aktif secara cerdas dan konstruktif dalam memecahkan berbagai persoalan sosial dan kemanusiaan yang dihadapi bangsanya.

Pembangunan karakter membutuhkan peran dan keterlibatan semua pihak secara kontinyu dan konsisten terhadap pembudayaan dan pelembagaan nilai-nilai kebaikan, kejujuran dan keadilan. Lemahnya karakter bangsa antara lain karena penyelenggaraan pendidikan yang lebih menekankan pada pengembangan kecerdasan intelektual dan menyederhanakan pengembangan kecerdasan spritual, emosional dan sosial, sehingga produk pendidikan sukses dalam melahirkan manusia yang memiliki konsep dan gagasan (cerdas intelektual), tetapi gagal melahirkan manusia yang menjadi teladan sejati yang jujur dan konsisten mewujudkan konsep dan gagasan pada tindakan nyata. Sementara itu retorika politik dan implementasi kebijakan pembangunan yang masih menampakkan realitas struktur sosial yang timpang dengan praktik KKN dan lemahnya penegakan hukum, sehingga reputasi, kejujuran dan komitmen pemerintah pun kehilangan kepercayaan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya pendidikan karakter pada rana sosial kultural menjadi semakin runyam, dan inilah tantangan besar yang dihadapi PKn di masa depan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, (2010) *Membangun Bangsa Melalui Pendidikan Berbasis Karakter*, dalam Jurnal Pendidikan Karakter, Publikasi Ilmiah Pendidikan Umum dan Nilai, Vol. 2 No. 2 Juli 2010.
- Buwono X, Sultan Hamengku (2007) *Merajut kembali Keindonesiaan Kita*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djahiri, H.A. Kosasih (2006) *Esensi pendidikan Nilai Moral Dan PKN Di Era Globalisasi, Dalam Pendidikan Nilai Moral Dalam Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan menyambut 70 tahun Prof. Drs.H.A. Kosasih Djahiri*, Bandung Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) FPIPS-UPI.
- Koesman, Soegeng (2009) *Membangun Karakter Bangsa Carut Marut dan Centang-Perenang Krisis Multi Dimensi di Era Reformasi*, Yogyakarta Lokus Tiara Wacana.
- Megawangi, Ratna (2004) *Pendidikan Karakter Solusi Yang tepat Untuk Membangun Bangsa*.
- Sauri, Sofyan (2010) *Strategi Implementasi Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi*, Makalah disampaikan pada Seminar Internasional & Workshop Pendidikan Karakter



Menuju Terbentuknya Masyarakat yang Berbudi Pekerti Luhur, PU & Nialai UPI Bandung, tgl 6 Oktober 2010.

- Tilaar, H.A.R (2007) *Mengindonesia Etnisitas dan Identitas Bangsa Indonesia Tinjauan dari Perspektif Ilmu Pendidikan*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.
- Wahab, Abdul Azis (2009) *Memantapkan Kembali jatidiri Bangsa Dalam Rangka Penguatan Dasar-Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Pendidikan Kewarganegaraan, UPI, Bandung, tgl 12 Desember 2009.
- Wahab, Abdul Azis & Sapriya (2008) *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, UPI PRESS, Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winataputra, Udin (2008) *Multikulturalisme-Bhineka Tunggal Ika Dalam Perspektif PKN Sebagai Wahana Pembangunan Karakter bangsa Indonesia.*, dalam "Acta Civicus, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Sekolah Pascasarjana UPI., Volume 2, No. 1 Oktober 2008.
- Winataputra, Udin dan Budimansyah (2007) *Civic Education Konteks, Landasan, Bahan Ajar dan Kultur Kelas.*, Bandung Program Studi pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas pendidikan Indonesia.